

ABSTRAK

Prabanita Sundari. “KRITIK KONSEP LAKI-LAKI NUSYUZ TERHADAP PASAL 149 KHI TENTANG NAFKAH PADA PERKARA CERAI GUGAT” Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung.

Tesis ini bertujuan untuk *pertama*, mengetahui nilai keadilan hukum pada pasal 149 KHI terkait nafkah suami kepada istri dalam perkara cerai gugat, *kedua* untuk mengetahui bagaimana nilai keadilan gender pada putusan hakim Nomor 1445/pdt.G/2010/PA.JS dan Putusan Nomor 6062/pdt.G/2010/PA.Tgrs dan *ketiga*, untuk mengetahui Bagaimana peluang perubahan konsep nusyuz laki-laki pada pasal 149 KHI.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Normatif, Selanjutnya metode penelitian ini menggunakan Analisis deskriptif, Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Kualitatif. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah dokumen putusan perkara No. 1445/Pdt.G/2010/PA.JS, dan Putusan Nomor 6062/pdt.G/2010/PA. Lalu sumber data sekundernya adalah peraturan perundang-undangan perkawinan. Selanjutnya teknik penulisannya berdasarkan Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung.

Penelitian ini menggunakan teori Penafsiran Hukum, Keadilan, Teori Kesetaraan Gender, dan Teori Mubadalah. Teori ini hadir untuk membantu setiap individu dalam memperoleh hak dasar sesuai dengan asas *equality before the law* atau kesamaan dihadapan hukum.

Hasil Penelitian: Implementasi nilai keadilan hukum pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah terkait dengan nafkah suami kepada istri dalam perkara cerai gugat, sangat bergantung pada pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim. Seperti Putusan Nomor 6062/pdt.G/2010/PA.Tgrs dimana hakim hanya menggunakan KHI sebagai pertimbangan hukum yang mengakibatkan istri tidak mendapat nafkah dari suaminya pasca cerai gugat. Tetapi, apabila hakim menggunakan pertimbangan hukum SEMA No. 2 Tahun 2019, maka dalam perkara cerai gugat, istri berhak atas nafkah dari suaminya seperti dalam Putusan Nomor 1445/pdt.G/2010/PA.JS dimana hakim memutuskan bahwa istri berhak atas nafkah dari suaminya sesuai dengan SEMA No. 2 Tahun 2019. Dari dua putusan yang penulis teliti yaitu Putusan PA Tigaraksa Nomor 6062/pdt.G/2010/PA.Tgrs dan Putusan Nomor : 1445/Pdt.G/2010/PA.JS, yang menurut penulis yang memenuhi kriteria keadilan gender adalah putusan PA Jakarta Selatan Nomor : 1445/Pdt.G/2010/PA.JS. Peluang perubahan konsep nusyuz terhadap laki-laki adalah *pertama* dengan adanya keterlibatan penerapan keadilan gender yang digunakan para Hakim serta didukung oleh SEMA Nomor 2 Tahun 2018 dalam setiap memutus perkara khususnya Cerai Talak. Peluang *kedua* yaitu adanya perumuskan ulang teks KHI Pasal 84 untuk mendapatkan konsep baru. *Ketiga* bentuk adanya upaya perubahan KHI selanjutnya pada buku fiqih indonesia yang membahas tentang Counter Legal Draf atau biasa disingkat CLD-KHI. Meskipun CLD-KHI ini telah di bekukan oleh Mentri Agama, akan tetapi secara konseptual CLD-KHI telah berhasil memadukan hukum islam dengan kenyataan demokrasi, pluralisme, hak asasi manusia, dan keadilan gender, baik dalam tataran metodologi maupun rumusan ketentuan hukum islam. Rumusan CLD-KHI telah menjadi bahan kajian dan perbincangan akademis yang cukup serius di banyak perguruan tinggi, sehingga pilihan pemikiran hukum keluarga Islam di Indonesia tidaklah tunggal hanya KHI yang ditetapkan pemerintah.

Kata Kunci: Implementasi, Laki-laki Nusyuz, Cerai Gugat

ABSTRACT

Prabanita Sundari. "Criticism Of The Concept Of Husband's Nusyuz Towards Article 149 Of The KHI (Indonesian Compilation Of Islamic Law) Regarding Maintenance In Divorce Petition" Department of Islamic Family Law, Faculty of Sharia and Law, State Islamic University (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung.

This thesis aimed to, first, determine the value of legal justice in Article 149 of the Indonesian Compilation of Islamic Law (KHI) regarding the husband's financial support to the wife in divorce cases; second, to understand how gender justice is valued in the verdicts of judge Number 1445/pdt.G/2010/PA.JS and Number 6062/pdt.G/2010/PA.Tgrs; and third, to explore the opportunities for changing the concept of 'nusyuz' (husband's disobedience) in Article 149 of KHI.

The approach used in this research was the Normative Juridical approach. The research method employed was Descriptive Analysis, and the type of research used was Qualitative research. The primary data sources for this study were court verdict documents No. 1445/Pdt.G/2010/PA.JS and No. 6062/pdt.G/2010/PA. The secondary data sources consisted of marriage legislation. The writing technique was based on the Guidelines for Writing Theses of the Faculty of Sharia and Law, State Islamic University (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung.

This research employed Legal Interpretation Theory, Justice, Gender Equality Theory, and Mubadalah Theory. These theories were used to assist every individual in obtaining fundamental rights in accordance with the principle of equality before the law.

Research Results: The implementation of the principle of legal justice in the Religious Court/Islamic Court concerning the husband's maintenance obligation to his wife in divorce cases heavily depends on the legal considerations used by the judge. For instance, in Decision Number 6062/pdt.G/2010/PA.Tgrs, the judge only relied on the KHI as the legal basis, resulting in the wife not receiving any maintenance from her husband after the divorce. However, if the judge considers the Supreme Court Circular Letter No. 2 of 2019, then in divorce cases, the wife is entitled to receive maintenance from her husband, as seen in Decision Number 1445/pdt.G/2010/PA.JS, where the judge ruled that the wife is entitled to maintenance from her husband in accordance with the Supreme Court Circular Letter No. 2 of 2019. Among the two decisions that the author analyzed, namely the Decision of PA (Religious Court) Tigaraksa Number 6062/pdt.G/2010/PA.Tgrs and Decision Number: 1445/Pdt.G/2010/PA.JS, the one that, according to the author, meets the gender justice criteria is the Decision of PA South Jakarta Number: 1445/Pdt.G/2010/PA.JS. The possibilities for changing the concept of nusyuz (wife's disobedience) toward men are, firstly, the involvement of gender justice in the judges' decision-making process, supported by the Supreme Court Circular Letter No. 2 of 2018 in handling cases, especially divorce petition (Cerai Talak). Secondly, there is a need for the reformulation of the text of KHI Article 84 to achieve a new concept. The third form of efforts for changes in KHI is through the book of Indonesian fiqh that discusses Counter Legal Draft-Indonesian Compilation of Islamic Law or commonly abbreviated as CLD-KHI.

Keywords: Implementation, Male Nusyuz, Divorce Petition